

Comparative Analysis of Economic Indicators during the Initial Years of Indonesian Presidential Leadership

Hendi Setiawan^{1*}, Tri Lestari², Okta Eka Putra³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author(s) Email : hendisetiawan23@student.unibi.ac.id

ABSTRACT

DOI :

Article History

Received : 16-01-2026
 Reviewed : 09-05-2026
 Revised : 29-05-2026
 Accepted : 30-05-2026

Licensed :

Keywords Inflation;
 Jakarta
 Composite
 Index (IHSG);
 Rupiah
 Exchange
 Rate; BI Rate;
 Economic
 Growth (GDP).

Introduction Kondisi makroekonomi menjadi indikator penting dalam menilai kinerja awal pemerintahan suatu negara. Perubahan kepemimpinan nasional sering dikaitkan dengan perubahan kebijakan ekonomi dan stabilitas pasar.

Background Problems Penelitian ini membahas perbedaan kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

Novelty Penelitian komparatif yang membandingkan indikator makroekonomi pada tahun pertama tiga periode pemerintahan berbeda di Indonesia masih terbatas, khususnya dengan pendekatan statistik komparatif menggunakan data bulanan.

Research Methods Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian komparatif. Data sekunder bulanan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Variabel yang dianalisis meliputi inflasi, return IHSG, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi (PDB). Analisis data dilakukan menggunakan Repeated Measures ANOVA dan uji Friedman sesuai asumsi normalitas data.

Findings/Results Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi di ketiga periode pemerintahan. Sementara itu, return IHSG dan nilai tukar Rupiah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Conclusion Kondisi makroekonomi pada tahun pertama pemerintahan lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan respons kebijakan dibandingkan perubahan kepemimpinan nasional. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika makroekonomi Indonesia pada berbagai periode pemerintahan.

INTRODUCTION

Sejak 2024, perekonomian global dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi kerja sama perdagangan internasional, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berdampak langsung pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan inflasi yang masih persisten serta perlambatan ekonomi di negara maju membuat proyeksi pertumbuhan global berada di bawah rata-rata historis (Kemenko Perekonomian, 2025; dan OJK Institute, 2025). Ketidakpastian global semakin diperparah oleh berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme AS, termasuk kenaikan tarif hingga 100% terhadap produk strategis Tiongkok seperti kendaraan listrik, mencerminkan eskalasi persaingan ekonomi kedua negara (CNN Indonesia, 2024).

Bagi Indonesia, kondisi ini berdampak ganda. Perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok berpotensi menekan kinerja ekspor dan memperlebar defisit neraca perdagangan (CNBC Indonesia, 2025). Namun, di sisi lain, relokasi industri dari Tiongkok membuka peluang peningkatan investasi dan ekspor Indonesia, khususnya di sektor elektronik dan otomotif. Kendati demikian, ketergantungan lebih dari 70% bahan baku elektronik dari Tiongkok tetap menjadi risiko terhadap ketahanan rantai pasok nasional (Kemenhan, 2025). Konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah turut menyebabkan volatilitas harga komoditas dan mempertahankan inflasi global pada level tinggi (CNN Indonesia, 2024). Selain itu, kebijakan moneter ketat dengan suku bunga tinggi dalam jangka panjang (*higher for longer*) di Amerika Serikat dan Eropa memperketat likuiditas global dan mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.

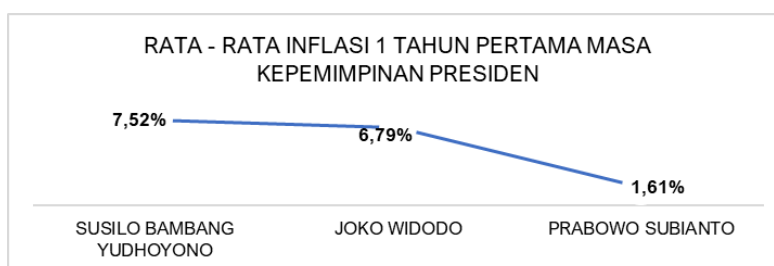
Dampaknya bagi Indonesia antara lain pelemahan Nilai Tukar Rupiah, meningkatnya biaya pendanaan, serta tekanan pada pasar saham dan obligasi domestik (Kemenko Perekonomian, 2025; Purwowidhu et al., 2023). Di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat sepanjang 2024-2025. Pada 2025, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian dengan kontribusi 54,5% terhadap PDB, meskipun pertumbuhan investasi melambat menjadi 2,12%. Inflasi tetap terkendali pada 1,95% dengan inflasi inti 2,5%, sementara APBN mencatat surplus Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB hingga April 2025, didukung oleh pertumbuhan pendapatan negara yang lebih cepat dibanding belanja (Dara, 2025; Susanti dan Putra, 2017).

Memasuki triwulan II 2025, kinerja ekonomi menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan mencapai 5,12% (yoy), didorong oleh konsumsi domestik, ekspor, dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97%, sementara investasi melonjak 6,99%, terutama dari sektor mesin. Realisasi investasi mencapai Rp477,7 triliun dengan pertumbuhan PMDN sebesar 30,5%. Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan, didukung sektor logam dasar, makanan dan minuman, serta kimia dan farmasi (Kemenkeu, 2025). Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan pengembangan kawasan industri hijau guna memperkuat struktur ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari evolusi kebijakan fiskal lintas pemerintahan. Pada awal era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), stabilitas fiskal diuji oleh lonjakan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia.

Kebijakan kenaikan harga BBM pada 2005, meskipun berdampak pada lonjakan inflasi dan peningkatan garis kemiskinan, merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang (Hakim & Giovani, 2012; Saleh, 2005). Pemerintah saat itu meredam dampak sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menjadi preseden penting dalam penggunaan instrumen fiskal sebagai penyangga sosial. Reformasi subsidi energi berlanjut secara lebih struktural pada era Joko Widodo. Penghapusan subsidi BBM Premium dan penerapan subsidi tetap pada Solar pada 2014 bertujuan mengalihkan belanja dari sektor konsumtif ke sektor produktif, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini menciptakan ruang fiskal yang signifikan dan berkontribusi pada stabilitas inflasi jangka menengah (Amir Hidayat, 2015; Hasan, 2018; IISD, 2015; Kemenkeu, 2015).

Memasuki pemerintahan Prabowo Subianto, fokus kebijakan fiskal diarahkan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia, dengan alokasi Rp71 triliun dalam APBN 2025. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali (DJSEF, 2024; Intan Ghita, 2025; Jaharuddin, 2025; SETKAB, 2025). Meskipun implementasi MBG menghadapi tantangan serapan anggaran, pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kebijakan fiskal ekspansif dengan disiplin anggaran (Anisah Lailatul & Laoli Noverius, 2025). Secara keseluruhan, perjalanan perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan SBY, Jokowi, dan Prabowo menunjukkan kesinambungan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global, dengan penekanan yang berbeda sesuai tantangan masing-masing periode, mulai dari pemulihan pascakrisis, reformasi struktural, hingga penguatan ketahanan fiskal dan ekonomi nasional.

Inflasi sebagai indikator stabilitas harga menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan energi pada tiap pemerintahan. Pada awal masa SBY (7,52%) dan Jokowi (6,79%), inflasi relatif tinggi akibat kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan harga pangan. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo dimulai dengan tingkat inflasi yang sangat rendah (1,61%), mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik dan memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah untuk fokus pada pembangunan tanpa tekanan inflasi yang signifikan.

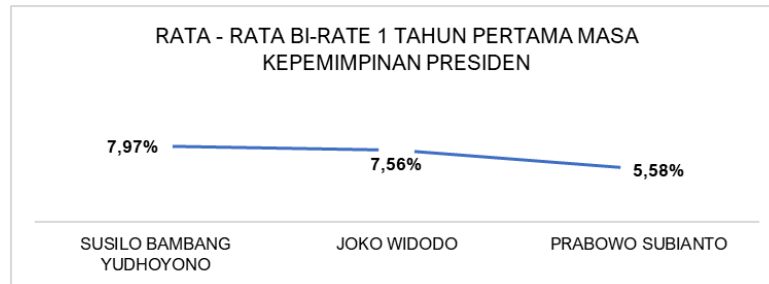


Grafik 1 Rata- Rata Inflasi 1 Tahun Pertama Masa Kepemimpinan Presiden

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

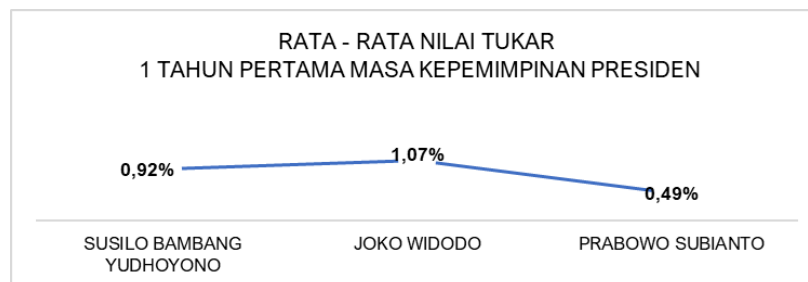
Kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia melalui *BI Seven-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) mencerminkan arah kebijakan moneter pada tiap periode pemerintahan. Pada awal pemerintahan SBY dan Jokowi, *BI Rate* berada pada level relatif tinggi masing-masing sebesar 7,97% dan 7,56%, yang menunjukkan kebijakan moneter ketat guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada era SBY, kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemulihan pascakrisis,

sementara pada era Jokowi dipengaruhi oleh tekanan kenaikan harga BBM dan arus keluar modal global. Sebaliknya, pada era Prabowo, BI *Rate* berada pada level lebih rendah sebesar 5,58%, mencerminkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Berikut adalah data rata-rata BI *Rate* 1 tahun pertama masa kepemimpinan presiden Indonesia, yaitu:



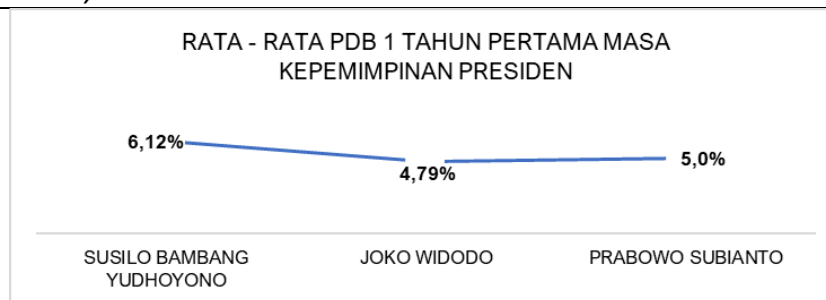
Grafik 2. Rata- Rata BI RATE 1 Tahun Pertama Masa Kepemimpinan Presiden
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Rata-rata perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun pertama masa jabatan Presiden menunjukkan bahwa era SBY mengalami pelemahan moderat sebesar 0,92% seiring kondisi global yang relatif stabil dan masuknya arus modal asing. Pada awal pemerintahan Jokowi, pelemahan meningkat menjadi 1,07% akibat tekanan eksternal, khususnya pengetatan kebijakan moneter global dan kenaikan suku bunga The Fed. Sementara itu, periode Prabowo mencatat rata-rata perubahan terendah sebesar 0,49%, mengindikasikan stabilitas nilai tukar yang lebih terkendali meskipun Rupiah berada pada level nominal yang lebih tertekan akibat tingginya suku bunga global dan risiko geopolitik. Berikut adalah data rata-rata nilai tukar IDR/USD 1 tahun pertama masa kepemimpinan presiden Indonesia, yaitu:



Grafik 3. Rata- Rata Nilai Tukar 1 Tahun Pertama Masa Kepemimpinan Presiden
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

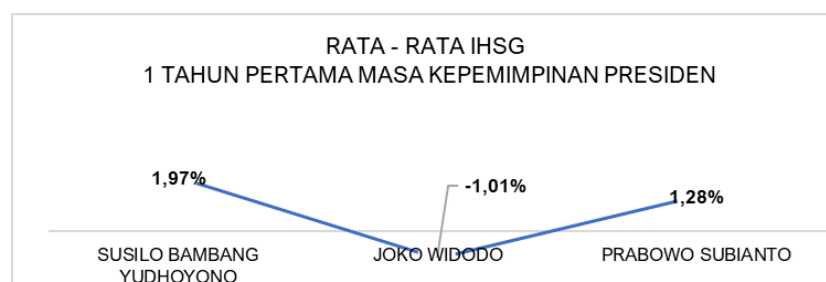
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kinerja PDB menunjukkan perbedaan antar pemerintahan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada era SBY sebesar 6,12%, didorong kondisi eksternal yang menguntungkan, terutama supercycle komoditas. Pada era Jokowi, pertumbuhan lebih rendah, yakni 4,79%, dipengaruhi penghapusan subsidi BBM dan perlambatan ekonomi global, namun kembali stabil seiring mulai berfungsinya proyek infrastruktur. Pada era Prabowo, pertumbuhan berada di kisaran 5%, mencerminkan stabilitas di tengah tekanan global. Berikut adalah data rata-rata PDB 1 tahun pertama masa kepemimpinan presiden Indonesia, yaitu:



Grafik 4. Rata- Rata PDB 1 Tahun Pertama Masa Kepemimpinan Presiden

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Kinerja IHSG pada tiga periode kepemimpinan menunjukkan dinamika yang berbeda. Pada era SBY, IHSG tumbuh rata-rata 1,97% didorong "SBY Effect", yaitu meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kebijakan pro-pasar meskipun terdapat tekanan global. Pada era Jokowi, IHSG mengalami kontraksi -1,01% akibat kombinasi guncangan global dan domestik, termasuk penurunan harga komoditas, pengetatan likuiditas global, serta lonjakan inflasi pasca reformasi subsidi BBM. Sementara itu, pada era Prabowo, IHSG kembali tumbuh positif sebesar +1,28% seiring meningkatnya optimisme investor terhadap keberlanjutan kebijakan dan proyek strategis yang telah berjalan. Berikut adalah data rata-rata IHSG 1 tahun pertama masa kepemimpinan presiden Indonesia, yaitu:



Grafik 5. Rata- Rata IHSG 1 Tahun Pertama Masa Kepemimpinan Presiden

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Secara keseluruhan, ketiga pemerintahan menunjukkan perbedaan orientasi kebijakan ekonomi yang saling berkesinambungan. Pemerintahan SBY berfokus pada pemulihan dan konsolidasi ekonomi pascakrisis melalui penguatan stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Pemerintahan Joko Widodo menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan daya saing nasional. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto mengarahkan kebijakan pada penguatan ketahanan fiskal dan moneter di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Sinergi antara pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, serta kepercayaan pasar menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perbandingan kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia pada periode atau kebijakan tertentu, baik sebelum dan sesudah suatu peristiwa maupun antarperiode pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wananda *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat inflasi yang signifikan antara periode sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Selanjutnya, Kusuma (2020) menemukan adanya perbedaan yang signifikan pada masing-masing variabel ekonomi makro

yang diteliti. Penelitian oleh Ramadhon *et al.*, (2022) menunjukkan adanya perbedaan antara volatilitas harga IHSG sebelum dan setelah pandemi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwanti, 2022) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada IHSG sebelum dan sesudah reshuffle kabinet.

Penelitian Permana *et al.*, (2022) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja saham Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19. (Susilowati & Sistiani, 2021) menemukan adanya perbedaan pembiayaan yang signifikan antara kedua bank tersebut. Penelitian terbaru oleh (Lubis *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal *return* maupun *trading volume activity* sebelum dan sesudah penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi, Inflasi meningkat akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Pergerakan IHSG mencatat peningkatan signifikan dari era SBY hingga Prabowo. Meskipun peningkatan IHSG mencerminkan optimisme dan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan prospek ekonomi Indonesia, indikator ini memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kondisi ekonomi riil secara menyeluruh.

Nilai Tukar Rupiah mengalami tren pelemahan dari masa SBY hingga Prabowo. Pergerakan BI *Rate* menunjukkan perbedaan strategi moneter di setiap periode pemerintahan. Pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan variasi di setiap periode pemerintahan. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara komprehensif membandingkan kinerja ekonomi pada tiga era kepemimpinan presiden Indonesia, yaitu SBY, Jokowi, dan Prabowo dalam satu kerangka analisis terintegrasi. Dengan menyoroti 1 tahun pertama masa pemerintahan, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai respons pasar dan stabilitas ekonomi terhadap transisi politik. Selain itu, penelitian ini memadukan lima indikator makroekonomi utama, seperti IHSG, BI *Rate*, Inflasi, PDB, dan Nilai Tukar IDR/USD untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang arah kebijakan ekonomi awal serta dampaknya terhadap kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.

LITERATURE REVIEW

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas perekonomian secara menyeluruh dan saling terhubung. Fokus kajiannya mencakup berbagai isu utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti ketidakstabilan aktivitas ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. (Sukirno Sadono, 2015). Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua komoditas saja, melainkan mencakup sebagian besar barang dan jasa di pasar. Sebaliknya, deflasi menggambarkan situasi kebalikan dari inflasi, yaitu ketika harga-harga secara umum justru mengalami penurunan. (Meiditambua *et al.*, 2023). Variabel inflasi diukur menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan rumus sebagai berikut:

$$\left| \text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{(t-1)}}{\text{IHK}_{(t-1)}} \times 100 \right|$$

BI *Rate* merupakan suku bunga acuan yang mencerminkan arah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan diumumkan secara terbuka kepada publik (Putri, 2016). Tingkat BI *Rate* tidak dihitung secara langsung, melainkan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga kebijakan (*policy rate*). Penetapan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kondisi makroekonomi, tingkat stabilitas sistem keuangan, serta ekspektasi inflasi di masa mendatang.

Nilai tukar merupakan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing di pasar valuta asing (Halawa, 2023). Dalam konteks nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), nilai ini menunjukkan jumlah Rupiah yang harus dibayar untuk memperoleh satu Dolar Amerika. Perhitungan nilai tukar IDR/USD dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\text{Jumlah Mata Uang Domestik (IDR)}}{\text{Jumlah Mata Uang Asing (USD)}}$$

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. PDB menggambarkan total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Melalui pengukuran PDB, dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta produktivitas nasional secara menyeluruh (Sujianto *et al.*, 2024). Menurut Klikpajak, perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) terdiri atas tiga pendekatan utama yang dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan ini menghitung total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara.

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

2. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa.

$$PDB = \sum (\text{Nilai Output} - \text{Konsumsi Antara})$$

3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri.

$$PDB = W + R + i + P + (T - S)$$

Menurut Bursa Efek Indonesia (IDX), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan

Pengembangan Bursa Efek Indonesia. IHSG sering digunakan sebagai indikator utama untuk melihat pergerakan pasar modal secara keseluruhan dan mencerminkan sentimen investor terhadap kondisi ekonomi nasional. Perhitungan IHSG dilakukan dengan membandingkan total nilai pasar seluruh saham pada waktu tertentu terhadap nilai pasar pada waktu dasar (*base period*). Rumus perhitungan IHSG adalah sebagai berikut:

$$\text{IHSG} = \frac{\text{Total Nilai Pasar Saat Ini}}{\text{Total Nilai Pasar pada Tahun Dasar}} \times 100$$

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H₁** : Terdapat perbedaan signifikan tingkat inflasi antara periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto pada satu tahun pertama masa pemerintahan.
- H₂** : Terdapat perbedaan signifikan *Return* IHSG antara periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto pada satu tahun pertama masa pemerintahan.
- H₃** : Terdapat perbedaan signifikan nilai tukar Rupiah (IDR/USD) antara periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto pada satu tahun pertama masa pemerintahan.
- H₄** : Terdapat perbedaan signifikan *BI Rate* antara periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto pada satu tahun pertama masa pemerintahan.
- H₅** : Terdapat perbedaan signifikan pertumbuhan ekonomi (GDP) antara periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto pada satu tahun pertama masa pemerintahan.

METHODS

Dalam penelitian ini, metode penelitian dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan relevan guna menguji kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian komparatif. Metode kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data (Hardani MSi *et al.*, 2020). Desain komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi pada 1 tahun pertama masa kepemimpinan tiga presiden Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian terapan (*applied research*) karena bertujuan memberikan gambaran serta analisis nyata mengenai perbedaan kinerja ekonomi antarperiode pemerintahan berdasarkan data empiris.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data indikator ekonomi makro Indonesia selama masa pemerintahan ketiga presiden tersebut. Data penelitian berupa data bulanan pada satu tahun pertama masing-masing pemerintahan. Adapun sampel penelitian terdiri atas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), *BI Rate*, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (IDR/USD). Periode penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Pemerintahan SBY dari Oktober 2004 - September 2005, Pemerintahan Jokowi dari Oktober 2014 - September 2015, dan Pemerintahan Prabowo dari

Oktober 2024 - September 2025. Penggunaan k sampel berpasangan dimaksudkan agar perbandingan dilakukan pada periode waktu yang setara, sehingga hasil analisis lebih mencerminkan perbedaan antarperiode pemerintahan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari beberapa sumber resmi, yaitu Bursa Efek Indonesia (IDX) untuk data IHSG, Bank Indonesia (BI) melalui publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) untuk data BI *Rate* dan Nilai Tukar Rupiah, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Inflasi dan Produk Domestik Bruto, serta Literatur pendukung berupa jurnal ilmiah dan laporan resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun data sekunder dari situs lembaga resmi serta literatur yang relevan dengan kebijakan ekonomi dan kinerja makro pada periode masing-masing presiden. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 31 (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Tahapan pengolahan data mencakup proses input data, pengelompokan berdasarkan periode pemerintahan, serta analisis statistik deskriptif seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing indikator ekonomi. Tahap awal analisis dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, yang meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi statistik berupa uji normalitas menggunakan *Shapiro-Wilk*, uji *sphericity* menggunakan *Mauchly's Test* pada data yang dianalisis secara parametrik. Variabel yang memenuhi asumsi normalitas dianalisis menggunakan *Repeated Measures ANOVA*.

Apabila hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan, analisis dilanjutkan dengan *Pairwise Comparison* untuk mengetahui perbedaan antarperiode pemerintahan. Sementara itu, variabel yang tidak memenuhi asumsi normalitas dianalisis menggunakan uji nonparametrik, yaitu uji *Friedman*. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada nilai signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antarperiode pemerintahan, sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar atau sama dengan 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan.

RESULT AND DISCUSSION

Penyajian hasil penelitian difokuskan pada pemaparan temuan empiris yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai fenomena yang diteliti,.

Tabel 1. Hasil Uji Noramalitas Kolmogrov-Smirnov

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual for InflationSBY	.129	12	.200 [*]	.948	12	.606
Standardized Residual for InflationJokowi	.206	12	.169	.913	12	.231
Standardized Residual for InflationPrabowo	.220	12	.112	.938	12	.473

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk pada 12 data sampel, seluruh variabel inflasi memiliki nilai signifikansi di atas 0.05. Nilai Sig. masing-masing variabel adalah 0.606 untuk Inflation SBY, 0.231 untuk Inflation Jokowi, dan 0.473 untuk Inflation Prabowo, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga, data memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik.

Tabel 2. Mauchly's Test of Sphericity

Mauchly's Test of Sphericity^a

Measure: Administrative_Period

Within Subjects Effect	Mauchly's W	Approx. Chi-Square	df	Sig.	Greenhouse-Geisser	Epsilon ^b	
						Huynh-Feldt	Lower-bound
Inflation_Period	.962	.387	2	.824	.963	1.000	.500

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix.

a. Design: Intercept

Within Subjects Design: Inflation_Period

b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan Mauchly's Test of Sphericity, diperoleh nilai Sig. $0.824 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa asumsi sphericity terpenuhi, sehingga varians data antar kelompok dinyatakan homogen dan pembacaan hasil menggunakan baris Sphericity Assumed.

Tabel 3. Tests of Within-Subjects Effects

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: Administrative_Period

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Inflation_Period	Sphericity Assumed	.025	2	.012	223.387	<.001
	Greenhouse-Geisser	.025	1.927	.013	223.387	<.001
	Huynh-Feldt	.025	2.000	.012	223.387	<.001
	Lower-bound	.025	1.000	.025	223.387	<.001
Error(Inflation_Period)	Sphericity Assumed	.001	22	5.587E-5		
	Greenhouse-Geisser	.001	21.195	5.800E-5		
	Huynh-Feldt	.001	22.000	5.587E-5		
	Lower-bound	.001	11.000	.000		

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Sig. (Sphericity Assumed) sebesar < 0.001 . Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$), maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat inflasi di antara ketiga periode pemerintahan tersebut.

Tabel 4. Pairwise Comparisons

Pairwise Comparisons

Measure: Administrative_Period

(I) Inflation_Period	(J) Inflation_Period	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^b	95% Confidence Interval for Difference ^b	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.007	.003	.155	-.002	.017
	3	.059 [*]	.003	<.001	.051	.067
2	1	-.007	.003	.155	-.017	.002
	3	.052 [*]	.003	<.001	.044	.060
3	1	-.059 [*]	.003	<.001	-.067	-.051
	2	-.052 [*]	.003	<.001	-.060	-.044

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the .05 level.

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap tingkat inflasi pada satu tahun pertama masa pemerintahan, diperoleh temuan yang menunjukkan perbedaan dampak antarperiode kepemimpinan. Perbandingan antara pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi menunjukkan adanya penurunan inflasi sebesar 0,007 atau 0,7%. Namun demikian, penurunan tersebut secara statistik tidak signifikan, yang tercermin dari nilai signifikansi sebesar 0,155 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sementara itu, perbandingan antara pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Prabowo menunjukkan penurunan inflasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,059 atau 5,9%, dan penurunan ini terbukti signifikan secara statistik karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,001 dan berada di bawah ambang 0,05. Selanjutnya, hasil perbandingan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo juga menunjukkan penurunan inflasi sebesar 0,052 atau 5,2% pada satu tahun pertama pemerintahan, dengan tingkat signifikansi yang juga lebih kecil dari 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan inflasi pada periode tersebut signifikan secara statistik.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual for InflationSBY	.129	12	.200 [*]	.948	12	.606
Standardized Residual for InflationJokowi	.206	12	.169	.913	12	.231
Standardized Residual for InflationPrabowo	.220	12	.112	.938	12	.473

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk pada 12 data sampel, seluruh data residual *Return* IHSG memiliki nilai signifikansi di atas 0.05. Nilai Sig. masing-masing variabel adalah 0.375 untuk *Return* IHSG SBY, 0.114 untuk *Return* IHSG Jokowi, dan 0.339 untuk *Return* IHSG Prabowo, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil ini juga didukung oleh uji Kolmogorov–Smirnov yang secara umum menunjukkan nilai signifikansi di atas 0.05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis statistik parametrik selanjutnya.

Tabel 6. Mauchly's Test of Sphericity

Mauchly's Test of Sphericity ^a							
Measure: Administrative_Period							
Within Subjects Effect	Mauchly's W	Approx. Chi-Square	df	Sig.	Greenhouse-Geisser	Epsilon ^b Huynh-Feldt	Lower-bound
Inflation_Period	.962	.387	2	.824	.963	1.000	.500

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix.

a. Design: Intercept
Within Subjects Design: Inflation_Period

b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan Mauchly's Test of Sphericity, diperoleh nilai Sig. $0.208 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa asumsi sphericity terpenuhi, sehingga varians data antar kelompok dinyatakan homogen dan pembacaan hasil menggunakan baris Sphericity Assumed.

Tabel 7. Tests of Within-Subjects Effects

Tests of Within-Subjects Effects						
Measure: Administrative_Period						
Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
ReturnIHSG_Period	Sphericity Assumed	.005	2	.003	.850	.441
	Greenhouse-Geisser	.005	1.575	.003	.850	.419
	Huynh-Feldt	.005	1.794	.003	.850	.431
	Lower-bound	.005	1.000	.005	.850	.376
Error(ReturnIHSG_Period)	Sphericity Assumed	.070	22	.003		
	Greenhouse-Geisser	.070	17.329	.004		
	Huynh-Feldt	.070	19.731	.004		
	Lower-bound	.070	11.000	.006		

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Sig. (Sphericity Assumed) sebesar 0,441. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,441 > 0,05$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *return* IHSG di antara ketiga periode pemerintahan tersebut.

Tabel 8. Pairwise Comparisons

Pairwise Comparisons						
Measure: Administrative_Period						
(I) ReturnIHSG_Period	(J) ReturnIHSG_Period	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^a	95% Confidence Interval for Difference ^a	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.030	.017	.310	-.018	.077
	3	.012	.027	1.000	-.066	.090
2	1	-.030	.017	.310	-.077	.018
	3	-.018	.023	1.000	-.084	.048
3	1	-.012	.027	1.000	-.090	.066
	2	.018	.023	1.000	-.048	.084

Based on estimated marginal means

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil pengujian komparatif terhadap *return* IHSG pada satu tahun pertama masa pemerintahan presiden, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode pemerintahan yang dibandingkan. Perbandingan antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya penurunan *return* IHSG sebesar 0,030 atau 3,0%, namun penurunan tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,310, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, perbandingan antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan penurunan *return* IHSG sebesar 0,012 atau 1,2%, yang secara statistik tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 1,000 ($> 0,05$).

Sementara itu, perbandingan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya kenaikan *return* IHSG sebesar 0,018 atau 1,8%, namun peningkatan tersebut juga tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 1,000 ($> 0,05$). Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa

perubahan kepemimpinan nasional tidak menimbulkan perbedaan *return* IHSG yang signifikan pada satu tahun pertama masa pemerintahan masing-masing presiden.

Tabel 9. Hasil Uji Noramalitas Kolmogrov-Smirnov

	Tests of Normality					
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual for EXCHANGERATESBY	.134	12	.200 ^a	.957	12	.741
Standardized Residual for EXCHANGERATEJOKOWI	.295	12	.005	.779	12	.006
Standardized Residual for EXCHANGERATEPRABOWO	.173	12	.200 ^a	.912	12	.227

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk pada 12 data sampel, data residual nilai tukar menunjukkan hasil yang bervariasi. Variabel Exchange Rate SBY memiliki nilai Sig. sebesar 0,741 dan Exchange Rate Prabowo sebesar 0,227, yang menunjukkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sementara itu, variabel Exchange Rate Jokowi memiliki nilai Sig. sebesar 0,006, yang berada di bawah 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Asumsi normalitas tidak sepenuhnya terpenuhi pada variabel nilai tukar, sehingga analisis selanjutnya menggunakan pendekatan statistik nonparametrik.

Tabel 10. Test Statistics - Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	12
Chi-Square	1.500
df	2
Asymp. Sig.	.472

a. Friedman Test

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,472, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,472 > 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan Exchange Rate antar periode pemerintahan. Pergantian periode pemerintahan dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo tidak memberikan perbedaan yang nyata (signifikan) terhadap pergerakan Nilai Tukar Rupiah.

Tabel 11. Hasil Uji Noramalitas Kolmogrov-Smirnov

	Tests of Normality					
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual for BIRATESBY	.249	12	.038	.763	12	.004
Standardized Residual for BIRATEJOKOWI	.460	12	<.001	.552	12	<.001
Standardized Residual for BIRATEPARBOWO	.244	12	.048	.880	12	.087

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk pada 12 data sampel, data residual BI Rate menunjukkan bahwa tidak seluruh periode berdistribusi normal. Variabel BI Rate SBY memiliki nilai Sig. sebesar 0,004 dan BI Rate Jokowi sebesar < 0,001, yang keduanya berada di bawah 0,05 sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Sementara itu, variabel BI Rate Prabowo memiliki nilai Sig. sebesar 0,087, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Asumsi normalitas tidak terpenuhi secara menyeluruh, analisis perbedaan BI Rate antarperiode pemerintahan dilanjutkan menggunakan metode statistik nonparametrik.

Tabel 12. Test Statistics - Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	12
Chi-Square	1.500
df	2
Asymp. Sig.	.472

a. Friedman Test

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Nilai Asymp. Sig. sebesar < 0,001, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (< 0,001 < 0,05) maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan BI Rate antar periode pemerintahan. Kebijakan penetapan BI Rate mengalami perubahan yang nyata (signifikan) di setiap pergantian periode pemerintahan dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo.

Tabel 13. Hasil Uji Noramalitas Kolmogrov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
GDP SBY	.227	4	.	.947	4	.699
GDP JOKOWI	.400	4	.	.704	4	.013
GDP PRABOWO	.307	4	.	.915	4	.508

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro–Wilk pada data GDP dengan jumlah sampel $df = 4$, diketahui bahwa distribusi data tidak sepenuhnya normal pada seluruh periode pemerintahan. Variabel GDP SBY memiliki nilai Sig. sebesar 0,699 dan GDP Prabowo sebesar 0,508, yang menunjukkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. Sementara itu, onparam GDP Jokowi memiliki nilai Sig. sebesar 0,013, yang berada di bawah 0,05 sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas pada onparam GDP tidak terpenuhi secara menyeluruh, sehingga analisis perbedaan antarperiode pemerintahan dilakukan menggunakan metode onparametric yang sesuai.

Tabel 14. Test Statistics – Friedman Test

Test Statistics ^a	
N	12
Chi-Square	1.500
df	2
Asymp. Sig.	.472

a. Friedman Test

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (SPSS Ver. 31), 2025

Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,018, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,018 < 0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) antar periode pemerintahan. Pergantian periode pemerintahan dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo memberikan dampak perbedaan yang nyata (signifikan) terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi (GDP).

Inflasi antarperiode pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan. Inflasi tertinggi terjadi pada masa SBY, yang dipengaruhi oleh tekanan global seperti lonjakan harga minyak hingga lebih dari USD 140 per barel dan dampak krisis finansial 2008 yang memicu kenaikan harga energi dan pangan. Kebijakan penyesuaian harga BBM juga memperkuat terjadinya *inflasi cost-push*, sehingga rata-rata inflasi pada era ini mencapai level tertinggi dari ketiga periode. Sebaliknya, inflasi pada era Prabowo berada pada tingkat terendah karena didukung oleh stabilitas harga komoditas global dan kebijakan stabilisasi pangan energi yang agresif, seperti operasi pasar dan penguatan cadangan pemerintah. Kondisi global yang lebih stabil menekan tekanan harga dan membuat inflasi

berada pada level yang sangat rendah. Selain itu, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang sama-sama menggunakan pendekatan komparatif terhadap indikator ekonomi pada periode atau kondisi yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Wananda et al. (2023).

Return IHSG antara ketiga periode pemerintahan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakter pasar saham yang bersifat *forward looking*, di mana pelaku pasar telah mengantisipasi arah kebijakan ekonomi sebelum masa pemerintahan berjalan, sehingga dampak kebijakan tidak langsung menciptakan perbedaan signifikan pada kinerja pasar secara agregat. Kebijakan domestik seperti penyesuaian subsidi energi di era SBY, reformasi BBM di era Jokowi, maupun program MBG pada masa Prabowo memang memengaruhi sektor tertentu, namun tidak cukup kuat untuk menciptakan perubahan signifikan pada *return IHSG* secara keseluruhan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan politik atau pergantian pemerintahan terhadap pasar saham Indonesia cenderung terbatas, seperti yang dilakukan oleh Ramadhon *et al.*, (2022) dan Suputra, (2021).

Exchange Rate antara ketiga periode pemerintahan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Pergantian pemerintahan tidak secara statistik menciptakan perubahan nyata pada *Exchange Rate*. Namun, pola pergerakan nilai tukar menunjukkan dinamika yang dipengaruhi kondisi eksternal global yang berbeda pada setiap periode. Pada masa SBY, Rupiah relatif kuat akibat stabilitas global dan tingginya harga komoditas yang mendorong arus modal masuk. Pada periode Jokowi, Rupiah melemah cukup tajam karena kombinasi pengetatan moneter The Fed, perlambatan ekonomi global, dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan internasional. Sementara pada awal pemerintahan Prabowo, Rupiah berada pada posisi yang lebih tertekan akibat suku bunga global yang masih tinggi serta risiko geopolitik internasional. Studi empiris terbaru lima tahun terakhir juga menegaskan hal ini (Lubis *et al.*, 2024) dan (Amri *et al.*, 2025).

BI Rate pada tiga periode pemerintahan menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan nilai *mean rank*, periode Prabowo memiliki peringkat yang jauh lebih rendah dibanding periode SBY dan Jokowi, menunjukkan bahwa tingkat *BI Rate* pada periode awal pemerintahannya berada pada posisi yang relatif lebih rendah. Pada periode SBY, *BI Rate* berada pada level yang relatif stabil karena inflasi yang terjaga dan dukungan komoditas global yang kuat. Memasuki era Jokowi, *BI Rate* mengalami fluktuasi lebih besar sebab Indonesia menghadapi tekanan eksternal seperti pengetatan kebijakan moneter global, kenaikan suku bunga The Fed, dan perlambatan perdagangan internasional. Pada awal pemerintahan Prabowo, Bank Indonesia menempatkan *BI Rate* pada posisi yang lebih rendah sebagai respons terhadap tekanan *exchange rate*, perlambatan permintaan global, serta kebutuhan menjaga stabilitas makro dan momentum pemulihan ekonomi. Hasil temuan ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Argantara, (2024).

Pertumbuhan ekonomi (GDP) pada tiga periode pemerintahan menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan nilai *mean rank*, periode SBY memiliki peringkat tertinggi, sedangkan Jokowi terendah, menunjukkan bahwa perbedaan paling mencolok terjadi pada periode Jokowi. Perbedaan signifikan ini dapat dijelaskan melalui dinamika ekonomi global dan domestik. Pada era SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh *booming* komoditas global khususnya batu bara, kelapa sawit, dan mineral yang mendorong ekspor dan memperbesar ruang fiskal negara. Kondisi global yang kondusif pascakrisis 1998

membuat ekonomi Indonesia tumbuh kuat. Sebaliknya, pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat lebih rendah karena dunia memasuki fase perlambatan struktural, penurunan harga komoditas, serta tekanan global seperti perang dagang dan pengetatan moneter The Fed. Pada awal pemerintahan Prabowo, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan meskipun berada pada kondisi global yang tidak pasti, ditandai suku bunga tinggi, geopolitik memanas, dan pelemahan perdagangan dunia. Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2020).

CONCLUSION AND SUGGESTION

Kesimpulan pada penelitian ini dirumuskan sebagai hasil akhir dari proses analisis yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dalam penelitian ini ditemukan terdapat perbedaan signifikan tingkat Inflasi antarperiode pada 1 tahun pertama pemerintahan. Inflasi tertinggi terjadi pada masa SBY akibat tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi dan krisis global, sedangkan Inflasi terendah muncul pada awal pemerintahan Prabowo yang ditopang stabilitas harga komoditas dan kebijakan pengendalian Inflasi. Pada variabel *Return IHS*, tidak ditemukan perbedaan signifikan *Return IHS* antarperiode pada 1 tahun pertama pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia lebih dipengaruhi faktor global seperti Suku Bunga The Fed, harga komoditas, dan arus modal asing dibanding pergantian pemerintahan.

Pada variabel *Exchange Rate*, tidak terdapat perbedaan signifikan Nilai Tukar Rupiah antarperiode pada 1 tahun pertama pemerintahan. Meskipun demikian, pergerakan deskriptif menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar terutama dipengaruhi kondisi keuangan global, bukan faktor politik domestik. Pada variabel *BI Rate*, terdapat perbedaan signifikan *BI Rate* antarperiode pada 1 tahun pertama pemerintahan. Perbedaan ini lebih mencerminkan siklus moneter global dan respon kebijakan Bank Indonesia yang independen, bukan perubahan pemimpin negara. Pada variabel *GDP*, terdapat perbedaan signifikan pertumbuhan ekonomi antarperiode pada 1 tahun pertama pemerintahan. Pertumbuhan tertinggi pada masa SBY dipengaruhi *commodity boom*, sementara perlambatan terjadi pada era Jokowi akibat tekanan global. Pada awal era Prabowo, pertumbuhan mulai membaik karena kebijakan fiskal ekspansif.

Saran dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, baik yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan maupun yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan antarperiode pemerintahan. Pertama, dari sisi tindakan praktis, pemerintah dan otoritas terkait disarankan untuk lebih memfokuskan kebijakan ekonomi pada penguatan stabilitas makroekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi (*GDP*) berbeda secara signifikan antarperiode pemerintahan, sehingga kebijakan fiskal dan struktural perlu dirancang lebih adaptif terhadap dinamika global seperti fluktuasi harga energi dan komoditas dunia. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga independensi kebijakan moneter dalam menetapkan *BI Rate* agar tetap responsif terhadap tekanan eksternal tanpa mengabaikan stabilitas domestik.

Kedua, dari sisi implikasi konseptual, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa perbedaan indikator ekonomi antarperiode pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor politik, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal global dan respon kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan kerangka analisis ekonomi ke depan perlu

lebih menekankan peran faktor global dan interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjelaskan dinamika ekonomi makro Indonesia lintas pemerintahan. Ketiga, dari sisi penelitian lanjutan, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu pengamatan agar dapat menangkap dampak kebijakan dalam jangka menengah dan panjang. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel makroekonomi lain seperti tingkat pengangguran, defisit anggaran, neraca perdagangan, atau arus modal asing. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih dinamis seperti model *time series*, *Vector Autoregression* (VAR), atau pendekatan panel diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perekonomian nasional.

References

- Agustini, A., & Argantara, Z. R. (2024). Pengaruh Bi Rate Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2019-2023 [Video recording]. In *AL-MUJADDID-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM* (Vol. 1, Issue 2, pp. 11–28).
- Amir Hidayat. (2015). *Reformasi Subsidi BBM: Mencari Jalan Tengah*. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Amri, M. I., Akhmad, A., Natsir, M., Sribianti, I., & Tahir, R. (2025). Komparasi Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(1), 975–981.
- Anisah Lailatul, & Laoli Noverius. (2025, October 15). Serapan Anggaran MBG Baru Capai 23%, Dampak Ekonomi Dinilai Belum Maksimal. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/serapan-anggaran-mbg-baru-capai-23-dampak-ekonomi-dinilai-belum-maksimal>
- CNBC Indonesia. (2025, April 11). *Perang Dagang China vs AS Makin Panas, Seberapa Buruk Dampak ke RI?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250411151916-128-625275/perang-dagang-china-vs-as-makin-panas-seberapa-buruk-dampak-ke-ri>
- CNN Indonesia. (2024, June 5). *Sri Mulyani Ungkap Dampak Perang Dagang AS-China Nggak Kaleng-kaleng*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240604192236-532-1105866/sri-mulyani-ungkap-dampak-perang-dagang-as-china-nggak-kaleng-kaleng>
- DJSEF, K. (2024). *Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025: Menuju Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan*.
- Hakim, A., & Giovani, G. (2012). Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 3(2).
- Halawa, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat. *Journal Economics And Strategy*, 4(1), 52–61.
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hasan, J. M. (2018). e-ISSN: 2527±564X Website Journal: <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance> DAMPAK PENCABUTAN SUBSIDI BBM BAGI KEUANGAN NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. In *Jurnal Renaissance* / (Vol. 3, Issue 01). <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>

- Haspramudilla Dara. (2025, June 2). *Kondisi Ekonomi Indonesia dan Kinerja APBN Mei 2025*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kondisi-ekonomi-indonesia-dan-kinerja-apbn-mei-2025>
- IISD. (2015). *BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA*. https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_newsbriefing_indonesia_feb2015_bahasa.pdf
- Intan Ghita. (2025). *Prabowo Pangkas APBN 2025 Hingga Rp306,6 Triliun untuk Biayai Program-program Prioritas*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-pangkas-apbn-2025-hingga-rp306-6-triliun-untuk-biayai-program-program-prioritas/7953284.html>
- Jaharuddin. (2025). *Efisiensi Anggaran dan Produktivitas Nasional, Navigasi Kebijakan di Tengah Tantangan*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/efisiensi-anggaran-dan-produktivitas-nasional-navigasi-kebijakan-di-tengah-tantangan/>
- Kemenhan. (2025, April 16). *Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html>
- KEMENKEU. (2015). *WARTA FISKAL*. 4–10. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/edisi_2_2015.pdf
- Kemenkeu. (2025, August 6). *Menkeu Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% di Triwulan II 2025, Didukung Konsumsi, Investasi, dan Ekspor*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-5,12-Triwulan-II-2025>
- Kemenko Perekonomian. (2025, November 5). *Tumbuh 4,95% (yoy) di Q3-2024, Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh diatas 5% Sepanjang Tahun 2024*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6049/tumbuh-495-yoy-di-q3-2024-pemerintah-optimis-ekonomi-indonesia-mampu-tumbuh-diatas-5-sepanjang-tahun-2024>
- Kusuma, J. R. (2020). Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 154–160.
- Lubis, M. Z. M., Putra, G. D. A., & Mohamad, Z. Z. B. (2024). Capital Market Reaction to the Strengthening of the Rupiah Exchange Rate against the US Dollar Exchange Rate. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 14(1), 81–88.
- Meiditambua, M. H., Centauri, S. A., & Fahlevi, M. R. (2023). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi: perspektif Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1), 17–26.
- OJK Institute. (2025, February 20). *Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute.
- Permana, A., Nurpiana, I., Kosim, B., & Hidayat, R. (2022). Perbedaan kinerja saham indonesia sebelum dan selama masa pandemi covid-19. *Motivasi*, 7(1), 31–41.
- Purwanti, E. (2022). Analisis Perbedaan IHSG Sebelum dan Sesudah Reshuffle Kabinet Periode Juni 2022. *Among Makarti*, 15(3).
- Purwowidhu. CS. (2023, June 1). *Optimisme Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2024*. Kementerian Keuangan RI. CS. Purwowidhu Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul "Optimisme Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2024 - Media Keuangan" Lihat selengkapnya di sini:

- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimisme-kerangka-ekonomi-makro-2024>
- Putri, R. N. S. (2016). Perilaku suku bunga perbankan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 4(2), 136–140.
- Ramadhon, R., Widyartati, P., & Setiawati, I. (2022). Analisis perbedaan volatilitas IHSG saat pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 14(1).
- Saleh, M. H. (2005). *KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY-JK TENTANG KENAIKAN HARGA BBM* 1 OKTOBER 2005.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/093413435820332-reformasi-subsidi-bbm-mencari-jalan-tengah>
- SETKAB. (2025). *Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-siapkan-kebijakan-strategis-untuk-dorong-ekonomi-nasional/>
- Sujianto, A. E., Puriandawati, N. A., Ilyana, A., Febriantika, K. Y., & Habibah, L. (2024). Analisis Penentuan Produk Domestik Bruto Atau GDP (2 Sektor). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(6), 101–110.
- Sukirno Sadono. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Suputra, G. A. (2021). Analisis perbandingan risiko saham sebelum dan saat krisis pandemic COVID19 pada tahun 2020 (Studi kasus: Harga penutupan saham perbankan yang tergabung dalam Indeks LQ45). *JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1).
- Susilowati, L., & Sistiani, N. (2021). Komparasi Determinan Pembiayaan Pada Bank Mandiri Dan Bank Syariah Mandiri. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 183–196.
- Susanti, N., & Putra, O. E. (2017). Penerapan capital asset pricing model (CAPM) terhadap keputusan investasi pada indeks LQ45 periode 2012–2016. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 369–379.
- Wananda, T. T., Sari, D. E., Kusuma, N. F., & Widodo, E. (2023). Analisis Perbandingan Tingkat Inflasi di Indonesia Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Journal of Mathematics Education and Science*, 6(1), 61–66.